

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman dan Riduan Syarani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Abdussamad, Zuchri, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press Makassar.
- Ali, Yunasril, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dahlan, Abul Azis, et.al, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam Edisi 4*, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Duvall dan Miller, 1985, *Marriage and Family Development*, Harper & Row, New York.
- Farida, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., et.al, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Abadi, Bandung.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya.

Ridwan, 2014, *Direksi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.

Rusli, R.Tama, 1984, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suryabrata, Sumadi, 1987, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta.

Suyatna, Bagong, 2005, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Yamin, Muhammad, 1952, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74.

Jurnal

Aslansyah, Muhammad, Studi Ajaran Hans Kelsen tentang Pure Theory of Law Ditinjau dari Perspektif Keadilan, *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 1, No. 1, Maret 2014.

Bahri, A. Syamsul, dan Adama, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1, Juni 2020

Faizal, Liky, 2016, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 8, Nomor 2, Juni 2016.

Fajarwati, Meirina, Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14. Nomor. 2, Juni 2017.

Hadi, Syofyan, dan Tomy Michael, Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2017

Juan Markus, Elia, Rr. Ani Wijayanti, & L. Ely A.M. Pandiangan, 2023, Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Volume 9, Nomor 1, April 2023.

Putu Ayu Masariandri, Luh, dan Ni Luh Gede Astariyani, Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 6, 2024.

Rahmi, Atikah, 2016, Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, *De Lega Latta*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.

Ramadhani, Irwan dan Nahrowi, 2023, Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama, *Journal of Law & Family Studies*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2023.

Ulya Kharisma, Bintang, 2023, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?, *Journal of Scientech Research and Development*, Vol. 5, No. 1, Juni 2023.

Tugas Akhir

Cahyadi, Irwan Adi, 2014, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Fitriyani, Desi, 2022, Keabsahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar.

Meliana Kurniawati, Fatiha, 2022, Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Pengadilan pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Skripsi*, D4 Demografi dan Pencatatan Sipil Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Nalle, Victor Imanuel W., 2013, Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol 6, No. 1, April 2013, hlm. 41-42.

Sekar Wigati, Nadia, 2015, Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Dispensasi Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yohana, Meilya Avelin, 2021, Analisis Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Antara Islam dan Katholik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Internet

- Aulina, Laurences, Kenny Wiston Law Office, 21 September 2020, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung”, diakses dari <https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/>, diakses pada 29 Maret 2024.
- Edwin, Elnizar Normand, 4 Agustus 2023, “Nasib Kawin Beda Agama dan Terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64cb75d5cbc5c/nasib-kawin-beda-agama-dan-terbitnya-sema-no2-tahun-2023>, diakses pada 22 Agustus 2023.
- Emerald Alamsyah, Ichsan, 16 September 2014, “Nikah Beda Agama, Buddha: Harus Seagama, Tak Bisa Ditawar” diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/nbzau8/nikah-beda-agama-buddha-harus-seagama-tak-bisa-ditawar-ii>, diakses pada 9 Desember 2023.
- Ishom, El-Saha, 19 Juli 2023, “Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama”, <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>, diakses pada 22 Agustus 2023.
- Khoeron, Moh, Kementerian Agama Republik Indonesia, 24 Juli 2023, “Larangan Nikah Beda Agama Halangi Kebebasan Beragama?”, [https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-bedaagama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx#:~:text=Baqarah%3A%20221\).-Keputusan%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20Nomor%204%2FMUNAS%20VII%2FMUI%2F,adalah%20haram%20dan%20tidak%20sah.,](https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-bedaagama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx#:~:text=Baqarah%3A%20221).-Keputusan%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20Nomor%204%2FMUNAS%20VII%2FMUI%2F,adalah%20haram%20dan%20tidak%20sah.,) diakses pada 08 November 2023.
- Komnas Perempuan, 27 Juli 2023, “Siaran Pers Komnas Perempuan Perempuan Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan>, diakses pada 22 Agustus 2023.
- Kun, Winandriyo, Mahkamah Konstitusi RI, 24 November 2014, “Perkawinan Beda Agama: PHDI dan KWI Beda Pendapat” diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401>, diakses pada 9 Desember 2023.
- Munawaroh, Nafiatul, Hukum Online, 22 Agustus 20013, “Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA, SEMA, Fatwa, dan SK KMA”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum->

[ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102#_ftnref4](#), diakses pada 13 Desember 2023.

Prasetyo, Andhika, 20 Juli 2023, “Tidak Sejalan dengan Kebhinekaan, SEMA 2/2023 Harus Dicabut”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/598084/tidak-sejalan-dengan-kebhinnekaan-sema-22023-harus-dicabut>, diakses pada 22 Agustus 2023.

Romana, Fransisca, 28 Juli 2023, “Kontroversi SEMA Nomor 2 Tahun 2023”, <https://indonesiasatu.co/detail/kontroversi-sema-nomor-2-tahun-2023>, diakses pada 1 November 2023.

Setianto, Danang, 27 Oktober 2023, “Pro Kontra Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023”, <https://jendelanasional.id/headline/pro-kontra-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023/>, diakses pada 1 November 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim untuk Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (Ditetapkan di Jakarta pada 17 Juli 2023).